



Universitas Katolik Parahyangan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Program Studi Ilmu Hubungan Internasional

Terakreditasi A

SK BAN-PT NO: 468/SK/BAN-PT/Akred/S/XII/2014

Keberatan India dalam Memasuki *Regional*
Comprehensive Economic Partnership (RCEP) Periode
2012-2019

Skripsi

Oleh

Lea Benanya

2015330018

Bandung

2019



Universitas Katolik Parahyangan

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Program Studi Hubungan Internasional

Terakreditasi A

SK BAN-PT NO: 451/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2014

***Keberatan India dalam Memasuki *Regional
Comprehensive Economic Partnership (RCEP) Periode
2012-2019****

Skripsi

Oleh

Lea Benanya

2015330018

Pembimbing

Dr. Adelbertus Irawan Justiniarto Hartono, Drs., M.A.

Bandung

2019

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Lea Benanya
NPM : 2015330018
Jurusan/Program Studi : Ilmu Hubungan Internasional
Judul : Keberatan India dalam Memasuki *Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP)*
Periode 2012-2019

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini adalah hasil karya tulis ilmiah sendiri dan bukan merupakan karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik oleh pihak lain. Adapun karya atau pendapat pihak lain yang dikutip, ditulis sesuai dengan kaidah penulisan yang berlaku.

Pernyataan ini saya buat dengan penuh tanggung jawab dan bersedia menerima konsekuensi apapun sesuai aturan yang berlaku apabila dikemudian hari diketahui bahwa pernyataan ini tidak benar.

Bandung, 8 Agustus 2019

Lea Benanya

ABSTRAK

Nama : Lea Benanya

NPM : 2015330018

Judul : Keberatan India dalam Memasuki *Regional Comprehensive Economic Partnership* (RCEP) Periode 2012-2019

Dengan desakan IMF, India mulai membuka diri terhadap pihak asing sejak krisis ekonomi 1991. Bukan hal yang mudah bagi India untuk membuka ekonominya terhadap liberalisasi dengan adanya latar belakang proteksionisme. Karakteristik proteksionis India dapat terlihat dari tindakan-tindakan India dalam menjalin kerjasama internasional, dimana India masih menerapkan beberapa kebijakan proteksi. Salah satu tindakan tersebut dapat terlihat dari *Regional Comprehensive Economic Partnership* (RCEP). RCEP adalah sebuah usulan FTA; sebuah kerjasama di kawasan Indo-Pasifik dengan total 16 negara anggota termasuk Tiongkok dan Jepang. RCEP yang dicetuskan oleh ASEAN dan berlandaskan liberalisasi ekonomi ini berusaha untuk memperdalam hubungan antara negara anggota ASEAN bersama dengan rekan-rekan FTA-nya, serta untuk menciptakan area perdagangan yang luas. Namun, RCEP masih berstatus negosiasi dan belum berdiri secara resmi. Salah satu alasannya disebabkan oleh India yang belum mau membuka diri secara penuh terhadap RCEP dikarenakan beberapa keberatan.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menggambarkan dilema India dalam memasuki RCEP dan berusaha untuk menjawab pertanyaan penelitian ini: *apa saja keberatan India dalam memasuki RCEP sebagai negara-anggota?* Dengan menggunakan konsep Penentu Integrasi Negara Berkembang oleh Eduard Marinov yang berlandaskan teori Integrasi Ekonomi, penulis menemukan tiga keberatan India dalam memasuki RCEP yang terbagi dalam dua faktor; yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal berisi ekspor India yang rendah dan industri domestik yang kurang kompetitif. Sementara itu, faktor eksternal terdiri dari tarif RCEP yang terlalu rendah dan kekhawatiran India terhadap aliran masuk impor Tiongkok.

Kata kunci: RCEP, India, Regionalisme, Integrasi Ekonomi, Integrasi Ekonomi Regional

ABSTRACT

Name : Lea Benanya

NPM : 2015330018

Title : *India's Objection towards Entering the Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) in 2012-2019 Period*

At the insistence of the IMF, India had started to open itself up to foreign parties ever since the 1991 economic crisis. It is not an easy feat for India to open up its economy towards liberalization, keeping in mind its background of protectionism. The protectionist characteristic can be seen from India's actions when conducting international cooperation, in which India has still set several protection policies. One of such actions can be seen from the Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP). RCEP is a proposed FTA; a partnership at the Indo-Pacific region with a total of 16 member-states, including China and Japan. RCEP—which was proposed by ASEAN, based on economic liberalization—strives to deepen the relationships between ASEAN member-states along with their FTA partners, as well as to create a vast free-trade area. However, RCEP's status is still a negotiation and has not been established formally. One of the reasons is because India hasn't fully wanted to open up towards RCEP due to several objections.

This study aims to depict India's dilemmas towards entering the RCEP and tries to answer this research question: what are the India's objection behind joining as a member of the RCEP? By using the concept of Determinants of Integration in Developing Countries by Eduard Marinov which is based of Economic Integration theory, the author found three India's objections from joining the RCEP which are divided into two factors; namely the internal factors and the external factors. The internal factors contain the India's low export and uncompetitive domestic industry. Meanwhile, the external factors consist of the extremely low RCEP tariff and India's concerns for China's import inflows.

Keywords: RCEP, India, Regionalism, Economic Integration, Regional Economic Integration

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas kasih dan rahmat-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi berjudul Keberatan India dalam Memasuki RCEP Periode 2012-2019. Penulisan skripsi ini dibuat untuk menjadi syarat kelulusan di Program Studi Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Katolik Parahyangan. Penulis juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Dr. Adelbertus Irawan Justiniarto Hartono, Drs., M.A. selaku dosen pembimbing yang telah banyak membantu dan membimbing penulis sehingga penulisan skripsi ini selesai.

Penulis sadar bahwa penulisan ini masih jauh dari kata sempurna, oleh karena itu penulis ingin meminta maaf apabila penulisan ini masih banyak memiliki kekurangan baik prosedural maupun substantif. Penulis juga terbuka apabila ada yang ingin memberi saran terhadap penulisan ini agar menjadi penulisan yang lebih baik lagi dan berguna bagi masyarakat.

Penulis juga ingin mengucapkan terima kasih kepada orang-orang yang telah membantu dan mendukung penulis untuk segera menyelesaikan skripsi ini. Kepada Papa dan Mama, Ka Lewi dan Uis, terimakasih atas pengertiannya sehingga penulis diijinkan pulang malam ataupun menginap di gereja. Lalu untuk kawan-kawan Seven Icon yang sangat luar biasa, terlebih Jeje dan Yuri yang sudah menjadi sobat gadang menemani penulis hingga larut malam. Juga untuk geng WA Supporter Iman, Itin, Justine dan Ola. Tak lupa kepada geng Cover Ala-ala, Kiki

dan Atha, mari bercover ria setelah ini. Juga untuk Laoshi Ira yang telah menemani penulis begadang di gereja dan Ka Pita, terima kasih untuk botramnya. Penulis juga berterima kasih kepada teman-teman Sombar, terlebih Lidya, Wewe, dan Ka Cath. Sekali lagi terima kasih untuk semuanya.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR GAMBAR.....	vii
DAFTAR LAMPIRAN	viii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
1.1 LATAR BELAKANG MASALAH	1
1.2 IDENTIFIKASI MASALAH	4
1.2.1 PEMBATASAN MASALAH.....	6
1.2.2 PERUMUSAN MASALAH	6
1.3 TUJUAN DAN KEGUNAAN PENELITIAN.....	7
1.3.1 TUJUAN PENELITIAN	7
1.3.2 KEGUNAAN PENELITIAN.....	8
1.4 KAJIAN LITERATUR	8
1.5 KERANGKA PEMIKIRAN	11
1.6 METODE PENELITIAN DAN TEKNIK PENGUMPULAN DATA	19
1.6.1 METODE PENELITIAN.....	19
1.6.2 TEKNIK PENGUMPULAN DATA.....	20
1.7 SISTEMATIKA PEMBAHASAN.....	20
BAB II	21
PEREKONOMIAN INDIA	21
2.1 PENCAPAIAN INDIA BIDANG EKONOMI.....	23
2.2 SISTEM EKONOMI INDIA.....	24
2.2.1 SEJARAH EKONOMI	24
2.2.2 KEBIJAKAN INDIA: <i>LOOK EAST</i> DAN <i>ACT EAST POLICY</i>	30
2.2.3 KERJASAMA YANG DILAKUKAN INDIA.....	31
2.2.4 TINDAK PROTEKSIONISME INDIA.....	32
BAB III.....	35

<i>REGIONAL COMPREHENSIVE ECONOMIC PARTNERSHIP (RCEP)</i>	35
3.1 <i>CAKUPAN REGIONAL COMPREHENSIVE ECONOMIC PARTNERSHIP (RCEP)</i>	37
3.2 <i>PRINSIP-PRINSIP REGIONAL COMPREHENSIVE ECONOMIC PARTNERSHIP (RCEP)</i>	45
3.3 <i>PERTEMUAN-PERTEMUAN REGIONAL COMPREHENSIVE ECONOMIC PARTNERSHIP (RCEP)</i>	47
BAB IV	49
<i>KEBERATAN INDIA MASUK KE REGIONAL COMPREHENSIVE ECONOMIC PARTNERSHIP (RCEP)</i>	49
4.1 <i>KEUNTUNGAN DAN KERUGIAN INDIA MASUK RCEP</i>	50
4.2 <i>KEBERATAN INDIA DALAM MEMASUKI RCEP</i>	52
4.2.1 <i>EKSPOR INDIA DAN INDUSTRI DOMESTIK YANG KURANG KOMPETITIF</i>	55
4.2.2 <i>TARIF REGIONAL COMPREHENSIVE ECONOMIC PARTNERSHIP (RCEP) YANG TERLALU RENDAH</i>	61
4.2.3 <i>KEKHAWATIRAN INDIA TERHADAP BESARNYA ALIRAN MASUK IMPOR TIONGKOK</i>	66
BAB V	69
KESIMPULAN	69
DAFTAR PUSTAKA	73
LAMPIRAN	81

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Tingkat Rata-rata Tarif.....	33
Gambar 4.1 Ekspor India 2010-2018.....	58
Gambar 4.2 Tingkat Daya Saing India (2009-2018).....	59

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Jadwal Pertemuan-Pertemuan Regional Comprehensive Economic Partnership (2012-2019).....	81
--	----

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG MASALAH

Negara-negara dewasa ini banyak melakukan kerjasama baik bilateral maupun multilateral dalam banyak bidang, baik itu ekonomi, militer, budaya atau pun yang lainnya. Hal ini dilakukan demi memenuhi kebutuhan dan kepentingan masing-masing negara. Tentunya kerjasama-kerjasama ini sangatlah penting sebagai pendukung atau bahkan penunjang negara untuk tetap mempertahankan eksistensinya dalam lingkup internasional, mengingat sebuah negara tidak dapat berdiri sendiri tanpa adanya bantuan dari negara lain, terlebih negara-negara berkembang.

Adapun bentuk kerjasama saat-saat ini menjadi sangat banyak dan beragam. Seiring berjalannya waktu dan perubahan yang merubah dunia menuju ke arah modern memunculkan banyak kerjasama-kerjasama yang tidak hanya melibatkan dua aktor saja, namun mendorong terciptanya kerjasama dengan cakupan yang lebih luas lagi seperti kerjasama kawasan yang merupakan hubungan dengan berbagai negara yang berada di sebuah daerah atau kawasan. Hal ini biasanya dipererat dengan adanya hubungan sejarah, keadaan geografis atau kebutuhan dan kepentingan yang serupa. Dikarenakan alam yang sewaktu-waktu berubah, sampai sekarang masih belum adanya definisi yang jelas mengenai *region* atau kawasan.

Namun kerjasama-kerjasama kawasan terus berjalan dan memiliki pengukur serta karakteristik masing-masing untuk membedakan kerjasama yang satu dengan yang lainnya.¹

Dari sekian banyak *output* yang dihasilkan, kerjasama-kerjasama ini pada akhirnya akan berujung pada sebuah kesepakatan atau perjanjian yang salah satunya dapat kita sebut *free trade agreement*. *Free trade agreement* dihasilkan dari *Free Trade Area*, dimana FTA merupakan tanda resmi agar negara yang bersangkutan mengikuti kesepakatan yang sudah ada dan tidak melanggar aturan yang sudah ditetapkan. FTA pada umumnya dilakukan untuk membantu perekonomian negara terlibat, sehingga penting adanya bagi negara-negara berkembang untuk melakukan FTA dengan negara-negara lain khususnya dengan negara maju. Negara maju pun membutuhkan negara-negara berkembang sebagai target pasar produksi mereka. Hal ini merupakan siklus perekonomian yang selalu terjadi dalam sebuah lingkungan, dan siklus perekonomian ini perlu memiliki aspek-aspek penting seperti pertumbuhan ekonomi dan perdagangan.

Pertumbuhan ekonomi dan perdagangan merupakan hal yang krusial dalam perekonomian suatu negara. Dengan adanya regionalisme dan banyak FTA yang dilakukan negara-negara menunjukkan bahwa negara telah bergerak melakukan tindakan-tindakan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Apalagi dengan adanya FTA yang memiliki latar belakang kawasan, atau integrasi ekonomi regional yang memiliki banyak anggota di kawasan dan dengan tujuan yang sama

¹ Roberta Capello and Peter Nijkamp, *Handbook of Regional Growth and Development Theories* (Cheltenham: Edward Elgar, 2010).

pula. Dengan adanya kerjasama-kerjasama kawasan yang dibentuk oleh negara-negara berdaulat ini, maka dapat meningkatkan perekonomian serta mempererat hubungan negara-negara yang terlibat. Namun seiring majunya dunia yang semakin modern, banyak aktor-aktor internasional yang pada akhirnya membuat berbagai macam kerjasama FTA dengan berbagai bentuk. Contohnya adalah seperti *Economic Partnership Agreement (EPA)*, *Regional Partnership Agreement (RPA)* ataupun perjanjian-perjanjian lainnya yang didasarkan pada konsep FTA.

RCEP atau *Regional Comprehensive Economic Partnership* adalah salah satu contoh kerjasama kawasan yang dilandaskan oleh FTA. Bermula dari negara-negara Asia Timur yang sering melakukan kerjasama-kerjasama untuk memajukan ekonominya, RCEP dicetuskan untuk semakin memperlebar perdagangan antar negara ini. Anggota-anggota RCEP terdiri dari negara-negara yang tergabung di ASEAN, ditambah negara-negara yang telah menjalin hubungan kerjasama atau memiliki FTA dengan ASEAN yaitu Australia, Republik Rakyat Tiongkok, India, Republik Korea, Jepang dan Selandia Baru. Dengan melihat dari anggota-anggotanya, RCEP merupakan calon kerjasama kawasan yang memiliki cakupan besar dan padat penduduk dimana ada beberapa negara dengan penduduk terbanyak ada dalam kerjasama kawasan ini.²

Namun RCEP belum secara resmi menjadi sebuah kerjasama kawasan. RCEP masih berbentuk rancangan yang sedang dinegosiasikan oleh negara-negara anggota untuk mendapatkan hasil yang tepat, sesuai dan adil untuk setiap anggota.

² “Regional Comprehensive Economic Partnership,” ASEAN, diakses pada 7 Oktober 2018, https://asean.org/?static_post=rcep-regional-comprehensive-economic-partnership#

Meskipun RCEP merupakan hasil dari ASEAN dan masih berupa negosiasi-negosiasi, banyak peneliti yang memperkirakan keberhasilan RCEP. Dan dengan semakin majunya perekonomian Asia Timur, maka RCEP sedang menjadi perhatian dunia, mensejajarkan dirinya dengan Trans-Pacific Partnership (TPP) yang dipimpin oleh Amerika Serikat. Adanya Tiongkok dan Jepang dalam satu kawasan yang sama semakin memperkuat kawasan Asia Timur. *Emerging actors* di Asia Timur seperti India dan negara-negara lain yang memiliki potensi kuat juga semakin memperkuat kawasan ini, sehingga apabila dihitung, anggota RCEP menyumbang sebesar 30% *Gross Domestic Product* (GDP) dunia.³

1.2 IDENTIFIKASI MASALAH

RCEP sendiri merupakan kerjasama kawasan di bidang ekonomi yang dirancang untuk mengembangkan perekonomian anggotanya terkait perdagangan dan investasi dengan tujuan untuk mencapai perjanjian perekonomian yang sama-sama menguntungkan anggota terlibat. RCEP akan bergerak di dalam bidang perdagangan barang, perdagangan jasa, investasi, kooperasi ekonomi dan teknik, hak milik properti, kompetisi, penyelesaian sengketa, perdagangan elektronik, UKM, dan isu lain.⁴ Beberapa hal ini merupakan bahan negosiasi yang perlu

³ *Ibid.*

⁴ *Ibid.*

diperbincangkan negara anggota agar memiliki pandangan dan pemahaman yang sama terkait peraturan yang akan dijalani nantinya.

Dicetuskan tahun 2012 pada *ASEAN Summit* yang ke-21 di Kamboja, lalu memulai negosiasi pada tahun 2013, RCEP diperkirakan rampung dan berbentuk badan pada tahun 2015. Namun sampai penghujung tahun 2015, RCEP masih berbentuk negosiasi. Hal ini berarti prediksi para pemimpin terhadap resminya RCEP tidak terjadi. *Deadline* kemudian ditetapkan pada tahun 2016, namun kembali gagal. Begitu juga dengan tenggat waktu tahun 2017 dan 2018. Hal ini terus terjadi sampai sekarang, dimana RCEP masih belum juga diresmikan setelah melewati proses kurang lebih enam tahun dari tahun 2013 sampai tahun 2019.⁵

Potensi yang dicerminkan dari RCEP terlihat besar dan menjanjikan pada awalnya. Adanya Tiongkok dan Jepang, ditambah dengan perdagangan Asia Timur yang semakin maju, tentunya membuat RCEP mendapat nilai lebih. Dengan fokus pada liberalisasi ekonomi, RCEP diprediksikan akan membuka banyak pasar dan peluang perdagangan yang lebih besar, serta peluang terbukanya lapangan kerja yang lebih banyak. Namun tenggat waktu penyelesaian RCEP yang berkali-kali terlewatkan membuat efektivitas RCEP dipertanyakan. Dari sekian tahun yang telah terlewati, RCEP masih belum rampung juga.

Tentunya ada beberapa faktor yang dapat membuat RCEP tidak diresmikan sesuai waktu yang ditetapkan. Baik faktor internal maupun eksternal, keduanya sangat mempengaruhi. Salah satu kunci masalah RCEP belum selesai adalah karena

⁵ "RCEP Negotiating Nations Now Aim to Conclude Agreement in 2018+," Viet Nam News, diakses pada 20 Maret 2018, <https://vietnamnews.vn/economy/417421/rcep-negotiating-nations-now-aim-to-conclude-agreement-in-2018.html#v301Cggt75PvRuQ4.97>

ada banyaknya negara anggota yang memiliki banyak karakteristik serta kepentingan yang berbeda-beda. Perbedaan inilah yang perlu disesuaikan melalui banyaknya ronde negosiasi. Dari sekian banyak faktor, peran dari setiap negara anggota juga mempengaruhi proses penyelesaian negosiasi RCEP, namun perlu diperhatikan pula bahwa cara setiap negara dalam menyelesaikan negosiasi pun juga dipengaruhi oleh latar belakang dan budaya negara masing-masing.

1.2.1 PEMBATASAN MASALAH

Dengan menggunakan studi pustaka dan berita-berita mengenai RCEP, maka penulisan ini hanya akan menganalisis keberatan India yang menjadi penyebab tenggat waktu penyelesaian negosiasi RCEP terlewat, dari tahun 2012 hingga awal tahun 2019. Sumber yang ada sebelum dan sesudah waktu tersebut tidak penulis masukkan ke dalam penelitian.

1.2.2 PERUMUSAN MASALAH

Dari sekian banyak negara anggota, India sebagai *emerging actor* juga memainkan peranan penting dalam proses penyelesaian negosiasi RCEP. India dikenal dengan negara yang memang sudah mengakui liberalisasi dan perdagangan bebas. Namun dalam penerapannya, India terkadang masih menutup dirinya

terhadap pasar bebas dengan berbagai alasan. Hal ini dapat kita lihat dalam salah satu contoh perannya dalam WTO.

Dengan alasan yang sama disaat India memasuki WTO, India pun mengalami dilema disaat memasuki RCEP. Latar belakang perekonomian India yang awalnya menutup diri terhadap pihak luar menjadi alasan kuat mengapa India perlu berhati-hati akan tindakannya menyangkut liberalisasi ekonomi dalam bentuk RCEP. Oleh sebab itu, dengan mengambil studi kasus India, maka penulisan ini akan menganalisis sebuah pertanyaan penelitian, "*Apa saja keberatan India dalam memasuki RCEP?*".

1.3 TUJUAN DAN KEGUNAAN PENELITIAN

1.3.1 TUJUAN PENELITIAN

Tujuan dari penulisan ini adalah untuk menggambarkan realita yang terjadi di kehidupan negara dalam berhubungan satu sama lain dan dilema sebuah negara, dalam penulisan ini India dalam memasuki sebuah kerjasama kawasan, atau RCEP. Penulisan ini berusaha menunjukkan bagaimana proses sebuah kerjasama kawasan dibentuk tidaklah mudah dan memerlukan usaha lebih dan banyak pertimbangan untuk menyatukan pandangan dan pengertian yang sama antar semua anggota. Semakin banyaknya anggota maka usaha yang dikeluarkan lebih besar. Dan peran setiap negara pun sangat berpengaruh. Dengan penulisan ini, maka diharapkan

pembaca dapat mengetahui dan mengerti akan sulitnya menciptakan kebijakan yang dapat diberlakukan di semua negara anggota dengan porsi yang adil dan sama dengan pertimbangan yang ada. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk menjawab pertanyaan penelitian “*Apa saja keberatan India dalam memasuki RCEP?*”.

1.3.2 KEGUNAAN PENELITIAN

Diharapkan dengan adanya penulisan ini dapat membantu masyarakat atau pembaca untuk memperoleh pengetahuan serta wawasan yang baru mengenai keberatan-keberatan yang didapatkan oleh sebuah negara, yang dapat memperlambat proses terjadinya sebuah kerjasama kawasan. Dengan menggunakan penelitian ini, masyarakat dapat mengambil sudut pandang yang lain terhadap keputusan sebuah negara dan dapat memutuskan untuk mendukung atau tidaknya keputusan tersebut dengan melihat dari sisi atau aspek keberatan yang ada. Selain itu, penulisan ini juga diharapkan dapat membantu peneliti lain sebagai bahan pembelajaran mengenai RCEP yang masih terbilang sedikit.

1.4 KAJIAN LITERATUR

Untuk mengerti lebih lanjut mengenai RCEP sebagai sebuah kerjasama kawasan serta hal-hal apa saja yang menjadi keberatan India dalam memasuki

RCEP, maka beberapa jurnal dibawah ini dapat dijadikan acuan untuk membantu memahami aspek-aspek diatas lebih dalam.

Is It Finally Time for India's Free Trade Agreements? The ASEAN Present and The RCEP Future

Literatur ini membahas mengenai India dan kerjasama FTA yang dilakukannya serta berfokus pada peran India di wilayah Indo-Pasifik. Lalu menjabarkan sejarah terciptanya FTA yang dijalankan India yang didasari oleh kebijakan *Look East* dan *National Common Minimum Programme*. Dimulai dari permulaan FTA Indo-ASEAN, lalu kebijakan luar negeri India, hingga FTA Indo-ASEAN selain rekan FTA ASEAN. Terkait dengan RCEP sendiri, literatur ini juga menjelaskan RCEP dan bagaimana India memiliki perbedaan yang menjadi alasan mengapa India dapat menjadi penghambat proses penyelesaian RCEP. Termasuk dengan hubungan antara India dengan Tiongkok.⁶ Literatur ini berfokus pada dua obyek yaitu ASEAN dan RCEP. Dengan menggunakan literatur ini, penulis berusaha untuk melihat latar belakang India dalam RCEP. Penulis juga akan menggunakan teori yang berbeda dalam menganalisis keberatan India dalam memasuki RCEP melalui perspektif integrasi ekonomi.

Comparing the Economic Impact of the Trans-Pacific Partnership and the Regional Comprehensive Economic Partnership

⁶ Debashis Chakraborty, dkk, "Is It Finally Time for India's Free Trade Agreements? The ASEAN Present and The RCEP Future," *Asian Journal of International Law*, 9 (2019), hal 359-391.

Jurnal ini membahas mengenai dampak dua kerjasama kawasan, yaitu TPP dan RCEP. Dampak ekonomi dari kedua kerjasama tersebut dibandingkan untuk melihat implikasi keduanya terhadap integrasi ekonomi di Asia Timur yang saat ini sangat berkembang dan menjadi pusat perhatian dunia dalam bentuk ekonomi. Dengan menggunakan model CGE, jurnal ini mengungkapkan bahwa baik TPP maupun RCEP memiliki hasil yang positif terhadap perekonomian negara anggotanya.⁷

RCEP: India Must Uphold Peoples' Rights and Welfare

Literatur ini membahas mengenai alasan India memiliki pengalaman yang tidak memuaskan dengan *regional trade agreement*. Namun India mulai membuka diri terhadap RCEP, dan juga menjelaskan bagaimana dampak dan implikasi RCEP terhadap India. Secara lengkap, literatur ini menjabarkan dampak RCEP baik positif maupun negatif terhadap bidang ekonomi, ketenagakerjaan, tanah dan agrikultur, serta jasa publik dan akses terhadap obat. Namun secara keseluruhan, masuk ke RCEP lebih merugikan India apabila tidak ditangani dengan kebijakan domestik yang tepat.⁸ Literatur ini berfokus pada dampak yang dihasilkan RCEP terhadap beberapa sektor di India. Peneliti akan menggunakan literatur ini untuk mengetahui hal-hal yang sebenarnya menjadi keberatan India dan berfokus pada keberatan

⁷ Jose Tongzon and Inkyo Cheong, "Summary of General Discussion on "Comparing the Economic Impact of the Trans-Pacific Partnership and the Regional Comprehensive Economic Partnership", " *Asian Economic Papers* 12, no. 2 (2013): , doi:10.1162/asep_a_00221.

⁸ Ajay Kumar Jha, "RCEP: India Must Upholdd Peoples' Rights and Welfare," *People over Profit Network of the Asia Pacific Research Network*, Country Briefer on RCEP and FTAs.

tersebut yang akhirnya dapat memberi dampak seperti yang dipaparkan di dalam jurnal ini.

1.5 KERANGKA PEMIKIRAN

Dalam memahami bagaimana sebuah negara melakukan hubungan melewati batas lintas negara, maka diperlukan pendekatan-pendekatan serta teori-teori hubungan internasional. Ada nilai-nilai sosial dasar yang menjadi perhatian negara, dimana salah satunya adalah kesejahteraan yang biasanya merujuk pada kesejahteraan ekonomi. Dari sekian banyaknya isu yang dibahas oleh hubungan internasional, ekonomi termasuk dalam isu penting negara sehingga melahirkan perdebatan yang pada akhirnya memunculkan banyak teori.⁹ Maka, sebagai landasan dalam menganalisis faktor-faktor yang menjadi keberatan India dalam memasuki RCEP yang mengutamakan perdagangan bebas, teori hubungan internasional yang cocok untuk digunakan pertama-tama adalah teori liberalisme dimana kesetaraan dan kebebasan individu merupakan hal terpenting, dan apabila adanya intervensi maka dapat mengubah keadaan. Liberalisme merupakan teori yang dapat menjelaskan bagaimana kerjasama internasional dapat dilakukan. Pandangan liberal mengenai ekonomi salah satunya adalah pasar bebas yang merupakan langkah yang tepat dilakukan tanpa adanya campur tangan dari pihak lain dengan maksud mencapai efisiensi yang maksimal, pertumbuhan ekonomi, dan

⁹ Georg Sorensen, Robert Jackson, *Introduction to International Relations, Theories and Approaches*, United Kingdom: Oxford University Press, 2010.

kesejahteraan individu.¹⁰ Richard Cobden mengatakan bahwa keberadaan ekonomi dan kesejahteraan sangatlah penting di dalam liberalisme.¹¹

Untuk dapat mengerti lebih dalam bagaimana pandangan liberalisme terhadap ekonomi, maka teori liberalisme ekonomi yang dikemukakan oleh Adam Smith dalam bukunya yang berjudul *The Wealth of Nation* adalah teori yang tepat. Teori liberalisme ekonomi berargumen bahwa ekonomi sebuah negara harus terpisah dengan politik yang ada, dengan maksud tindakan ekonomi sebuah negara tidak seharusnya dipengaruhi oleh pertimbangan-pertimbangan politik. Maka yang menjadi aktor utama pada teori ini bukanlah negara, melainkan individu atau perusahaan swasta yang melakukan tindak ekonomi.¹² Adanya campur tangan politik dapat membuat pasar menjadi sangat subyektif dan membuat harga barang dan jasa tidak kompetitif. Oleh sebab itu, Adam Smith mengatakan bahwa harga pasar seharusnya ditentukan oleh *invisible hand*, yang berarti harga terjadi dengan sendirinya tanpa ada intervensi dari pihak manapun.¹³ Intinya teori ini menjunjung tinggi kebebasan terlebih pada pasar untuk menentukan harga barang dan jasa secara sendirinya.

Franz Josef Stegmann membagikan esensi dari teori ekonomi liberal menjadi 4 bagian. Pertama adalah *the 'natural' order of the economy* yang mempercayai adanya *'natural' human being*, *'natural' forces*, *'natural' order of society and the economy* dimana negara tidak boleh campur tangan dalam sistem

¹⁰ Robert Gilpin, *The Political Economy of International Relation*, United Kingdom: Princeton University Press, 1987.

¹¹ Paul R. Viotti, Mark V. Kauppi, *International Relations Theory (5th edition)*, Harlow, UK: Pearson Education Inc., 2012.

¹² Adam Smith, *Wealth of Nation*, New York: Cosimo Inc, 2007.

¹³ Yulius P, *Transformasi dalam Studi Hubungan Internasional*, Bandung: Graha Ilmu, 2008.

‘alami’ karena hal tersebut merupakan urusan Tuhan, *the invisible hand* yang akan mengatur perekonomian seperti yang dikemukakan oleh Adam Smith, dan bukanlah manusia. Esensi kedua adalah *the individualistic idea of freedom* yang tidak jauh berbeda dengan esensi pertama dimana esensi ini mengharuskan negara menghilangkan sistem *preferential treatment and restraint* karena apabila negara ikut mengintervensi ekonomi maka ditakutkan ada kepentingan-kepentingan negara yang terselipkan sehingga tidak transparan. Negara hanya untuk memfasilitasi dalam hal teknis saja. Esensi ketiga yaitu *self-interest as the driving force in the economy – ‘altruism of egoism’*, yang berargumen bahwa motif alami dalam ekonomi yaitu kepentingan diri sendiri merupakan penggerak di proses ekonomi. Dan esensi terakhir adalah *competition as steering wheel of the economy* yang berarti kompetisi merupakan roda untuk menjalankan proses ekonomi.¹⁴

Selain itu, teori regionalisme akan menjelaskan bagaimana sebuah kawasan terlibat dalam sebuah tindakan yang akan memperkuat hubungan semua pihak yang terlibat didalamnya atau dapat kita sebut juga integrasi regional. Regionalisme adalah wujud dari sebuah bentuk regionalisasi seperti praktik institusional atau proses yang menyatukan aktor melalui beberapa bentuk seperti proyek ataupun kebijakan.¹⁵ Terkait dengan liberalisasi, Dilip Das berpendapat bahwa pada dasarnya regionalisme mendiskriminasi liberalisasi perdagangan karena regionalisme seakan-akan mengkhususkan sebuah kelompok berdasarkan

¹⁴ Franz Josef, *Economic Liberalism, Marxism and Critical Judgement*, South Africa: St Augustine College of South Africa, 2004.

¹⁵ Edward D Mansfield, Etel Solingen, “Regionalism,” *Annual Review of Political Science*, Vol 13; 2010, hal. 145-163

kawasan.¹⁶ Sedangkan, Filippo di Mauro beserta rekan-rekannya berpendapat bahwa regionalisme memiliki kesamaan dengan globalisasi yang juga mengarah kearah liberal, yaitu bahwa keduanya sama-sama menekankan peningkatan yang kuat dalam transaksi lintas batas barang dan jasa, modal, tenaga kerja, dan juga sumber daya alam. Keduanya dapat membuat perubahan yang signifikan serta keuntungan ekonomi yang baik. Hal ini menunjukkan bahwa regionalisme memang dalam satu sisi mendiskriminasi ideologi liberal, namun disisi lain regionalisme juga mendorong aspek-aspek liberal terutama dalam bidang ekonomi.

Dalam regionalisme, ekonomi juga termasuk salah satu aspek yang sangat penting. Adanya pandangan regionalisme ekonomi dapat membantu kita mengerti lebih lanjut. Regionalisme ekonomi sendiri adalah pengaturan yang dirancang sedemikian rupa untuk memfasilitasi arus barang dan jasa yang bebas serta pengaturan untuk kebijakan ekonomi asing antar negara di wilayah geografis yang sama oleh sebuah lembaga.¹⁷ Mengenai pelaku dari regionalisme, teori ini mengatakan aktornya adalah institusi atau sebuah badan yang diciptakan oleh pemerintah demi mendorong integrasi ekonomi regional.¹⁸ Integrasi ekonomi regional sendiri terbentuk dari integrasi ekonomi yang tercipta melalui regionalisme (wujud atau hasil regionalisasi) dan regionalisasi (proses). Beberapa bentuk integrasi ekonomi adalah pertama *Free Trade Agreement*. Dalam FTA, negara anggota akan menghilangkan batasan tarif di daerah perdagangan bebas, meskipun

¹⁶ Dilip K. Das, *Regionalism In Global Trade*, USA: Edward Elgar Publishing Inc., 2004.

¹⁷ Chung-in Moon, "Economic Regionalism," Britannica, diakses pada 10 September 2018, <https://www.britannica.com/topic/economic-regionalism>

¹⁸ Filippo di Mauro, dkk, *Globalisation, Regionalism, and Economic Interdependence*, New York: Cambridge University Press, 2008.

akan ada negara yang tetap mempertahankan posisinya. Kedua yaitu *Customs Union*. Sebagai lanjutan dari FTA, negara anggota akan menentukan *Common External Tariff* untuk semua negara. Bentuk yang ketiga adalah *Common Market*. Dalam bagian ini, negara anggota akan membuka pasarnya. Namun dalam pelaksanaannya, semuanya tergantung pada aturan politik dan sosial setiap negara. Bentuk keempat yaitu *Economic Union* yang dapat digambarkan dengan terciptanya kesamaan kebijakan ekonomi di semua negara anggota. Dan bentuk terakhir adalah *Monetary Union*. Bagian ini akan tercapai apabila di area yang sama, negara-negara menggunakan mata uang dan kebijakan ekonomi yang sama.¹⁹

Semua bentuk-bentuk diatas didasari pada kerjasama antar dua negara atau lebih di dalam sebuah kawasan. Tentunya ada beberapa alasan yang dimiliki sebuah negara dalam mengikuti sebuah kerjasama. Maurice Schiff dan Alan Winter mengatakan bahwa ada enam faktor yang menyebabkan sebuah negara mengikuti sebuah kerjasama atau perjanjian. Pertama adalah adanya harapan sebuah negara untuk memiliki kebijakan yang lebih baik dari sebelumnya termasuk demokrasi, dan untuk memberi tanda atau sinyal kepada investor domestik maupun luar negeri. Kedua adalah keinginan negara untuk memiliki akses terhadap pasar. Ketiga adalah karena adanya tekanan dari globalisasi yang memaksa perusahaan dan negara untuk mencapai efisiensi melalui pasar yang lebih besar, kompetisi dan akses terbuka terhadap teknologi dan investasi. Alasan keempat adalah keinginan pemerintah untuk mempertahankan kedaulatannya dengan negara di manajemen ekonomi di mana lebih banyak lebih baik. Kelima adalah keinginan pemerintah untuk

¹⁹ Bela Balassa, *The Theory of Economic Integration*, (Homewood: Richard Irwin, 1961).

menerapkan sistem multilateral yang lebih cepat dan dalam di beberapa area tertentu. Dan alasan keenam adalah untuk membantu negara tetangga menjadi lebih stabil dan makmur.²⁰

Dan dalam pengimplementasiannya, pada umumnya negara melakukan kerjasama ekonomi baik secara kawasan atau global, selain melalui organisasi ekonomi internasional juga melalui *free trade agreement* sebagai awal permulaan hubungan kerjasama. FTA sendiri merupakan perjanjian antara dua negara atau lebih untuk memudahkan tindak perdagangan dan menghapus hambatan perdagangan seperti contohnya tarif, antar negara-negara yang terlibat.²¹ Selain itu, FTA juga dibuat untuk membuat sebuah area perdagangan yang bebas dimana perdagangan barang dan jasa dapat melewati lintas batas negara dan masuk ke dalam pasar lain selain pasar domestik.²² Sama seperti Maurice Schiff, dengan menggunakan studi kasus negara Asia Timur, Shujiro Urata mengatakan beberapa alasan sebuah negara mau menjalin FTA. Pertama, karena melihat ekspansi FTA yang cepat di wilayah lain pada akhirnya membuat negara-negara di Asia menyadari pentingnya kerjasama FTA, yaitu untuk mempertahankan dan memperlebar kesempatan ekspor. Yang kedua adalah untuk menyebarluaskan perubahan domestik struktural untuk mencapai pertumbuhan ekonomi. Menarik negara lain agar menjalin FTA untuk mempertahankan dan meningkatkan tingkat

²⁰ Maurice Schiff and Alan Winters, *Regional Integration and Development*, Washington DC: World Bank dan Oxford University Press, 2003.

²¹ "Free Trade Agreement (FTA)," Business Development Bank of Canada, diakses pada 15 September 2018, <https://www.bdc.ca/en/articles-tools/entrepreneur-toolkit/templates-business-guides/glossary/pages/free-trade-agreement-fts.aspx>

²² "Free Trade Agreement," Business Dictionary, diakses pada 15 September 2018, <http://www.businessdictionary.com/definition/free-trade-agreement.html>

kompetitif masyarakat atau pelaku ekonomi. Ketiga, adanya persaingan antara negara-negara di ASEAN terhadap kepentingan peran kepemimpinan di sebuah kawasan. Semakin banyak menjalin FTA, maka negara tersebut semakin berpengaruh. Dan alasan terakhir, negara-negara menggunakan FTA untuk meningkatkan lingkungan bisnis di negara penerima.²³

Dengan ada banyaknya alasan serta faktor-faktor yang mempengaruhi, integrasi ekonomi merupakan konsep yang dapat dipakai untuk menganalisis bagaimana sebuah negara memiliki keberatan dalam memasuki RCEP. Analisis efek dinamik terhadap integrasi ekonomi menurut Bela Balassa adalah ekonomi skala besar, perubahan teknologi, juga dampak integrasi terhadap struktur pasar dan kompetisi, pertumbuhan ekonomi, resiko dan ketidakpastian serta kegiatan investasi.²⁴ Berikut juga merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi sebuah negara untuk terlibat dalam sebuah integrasi. Eduardo Marinov membagi faktor-faktor tersebut menjadi tiga bagian yaitu *general economic determinants*, *market-related determinants*, dan *trade-related determinants*. *General economic determinants* sendiri dilihat dari sudut pandang pembangunan terdiri dari koordinasi kebijakan makro-ekonomi, ukuran negara partisipan, dan dampak integrasi terhadap negara kecil. Bagian *market-related determinants* terdiri dari faktor dampak ketenagakerjaan dan produktivitas, spesialisasi produk, perlindungan terhadap pembangunan industry, daya saing internasional, serta kompetisi dan komplementaritas. Lalu bagian terakhir, *trade-related determinants*

²³ Shujiro Urata, "Constructing and Multilateralizing the RCEP: An Asian Perspective," *ADB Working Paper Series*, No. 440; Des 2013.

²⁴ *Ibid.*

yang melihat dari keuntungan *trade diversion*, bagian ini terdiri dari tingkatan tarif awal, perdagangan internasional sebagai bagian dari GDP, perdagangan intra-regional, mendorong perdagangan regional, lalu perubahan struktur perdagangan dengan negara maju serta infrastruktur transportasi.²⁵

Namun dikarenakan adanya perbedaan kondisi, kepentingan maupun latar belakang setiap aktor yang mengikuti integrasi ekonomi, dalam hal ini negara, integrasi ekonomi juga memiliki efek samping negatif, terlebih untuk negara yang memiliki kondisi perekonomian yang tertutup. Negara dengan kondisi perekonomian yang tertutup ini menerapkan teori proteksionisme yang justru bertentangan dengan liberalisme. Bentuk kerjasama integrasi ekonomi paling awal adalah FTA yang berusaha untuk mengeliminasi tarif antara negara terlibat yang lalu berkembang hingga mencapai *monetary union*. Hal ini berarti integrasi ekonomi berlandaskan liberalisme. Lantas bagi negara yang menerapkan proteksionisme akan memiliki dilema dalam mengikuti sebuah integrasi ekonomi.

Proteksionisme ini didasari oleh proteksi atau perlindungan terhadap sektor ekonomi atau sektor produksi domestik tertentu yang dianggap tidak dapat bersaing dengan produk impor atau produk luar negeri dikarenakan kurang efisien.²⁶ Proteksionisme sendiri merupakan sebuah teori atau kepercayaan terhadap keuntungan dari pembatasan perdagangan yang dapat mendorong atau

²⁵ Eduard Marinov, "Economic Inegration Theories and the Developing Country," *Munich Personal RePEc Archive Paper*, No. 63310.

²⁶ Boediono, *Seri Sinopsis Pengantar Ilmu Ekonomi No. 3: Ekonomi Internasional*, Yogyakarta: Bagian Penerbitan Fakultas Ekonomi Universitas Gadjah Mada, 1983, 156.

menguntungkan produsen domestik.²⁷ Bentuk-bentuk proteksi yang dilakukan negara menurut Boediono di akhir tahun 1980-an ada empat bentuk, yaitu tarif atau bea masuk, pelarangan impor, kuota, dan subsidi. Melengkapi bentuk proteksi Boediono, bentuk proteksi Veseth dan Balaam adalah tarif, kuota impor, kuota ekspor yang didalamnya termasuk *Voluntary Exports Restraints* (VERs), subsidi ekspor, devaluasi mata uang, batasan non-tarif, praktik perdagangan strategis, dumping, praktik perdagangan *countervailing, safeguards*.²⁸ Batasan-batasan ini dapat menjadi penghambat sebuah integrasi ekonomi tercapai karena dapat menciptakan ketidakselarasan di dalam anggotanya.

1.6 METODE PENELITIAN DAN TEKNIK PENGUMPULAN

DATA

1.6.1 METODE PENELITIAN

Dalam menganalisis keberatan India dalam memasuki RCEP, penulis akan menggunakan metode penelitian kualitatif. Penulis juga akan menggunakan metode penelitian kualitatif studi kasus yang dijabarkan oleh John W. Creswell, dimana pendekatan studi kasus ini bertujuan untuk menganalisis sebuah masalah melalui

²⁷ David N. Balaam, Michael Veseth, *Introduction to International Political Economy 2nd Edition*, New Jersey: Prentice-Hall, Inc., 2001, 467.

²⁸ David N. Balaam, Michael Veseth, *Introduction to International Political Economy 2nd Edition*, New Jersey: Prentice-Hall, Inc., 2001, 115.

studi kasus yang ada untuk menyelesaikan masalah tersebut. Pendekatan ini juga mencoba memahami dan menganalisis aktor yang melakukan studi kasus tersebut.²⁹

1.6.2 TEKNIK PENGUMPULAN DATA

Penulisan ini juga menggunakan studi pustaka dalam membahas keberatan India dan aspek-aspek yang berkaitan, baik melewati buku, artikel, jurnal, data-data dari internet yang berasal dari situs resmi dan menggunakan data sekunder yang telah dianalisis oleh narasumber lain.

1.7 SISTEMATIKA PEMBAHASAN

Untuk menjelaskan secara lebih lanjut keberatan India dalam memasuki RCEP, pertama-tama Bab I akan menjelaskan latar belakang RCEP sebagai sebuah kerjasama. Bab II diteruskan dengan penjelasan mengenai perekonomian India baik sejarahnya sebelum dan sesudah kemerdekaan, maupun sebelum dan sesudah krisis 1991. Lalu Bab III akan menjabarkan cakupan serta prinsip-prinsip RCEP. Bab IV akan membahas analisis keberatan India dalam memasuki RCEP. Dan penulisan ini akan diakhiri dengan kesimpulan serta lampiran daftar pustaka.

²⁹ John W. Crewell, *Qualitative inquiry & Research Design*, Amerika: Sage Publication, 2007.